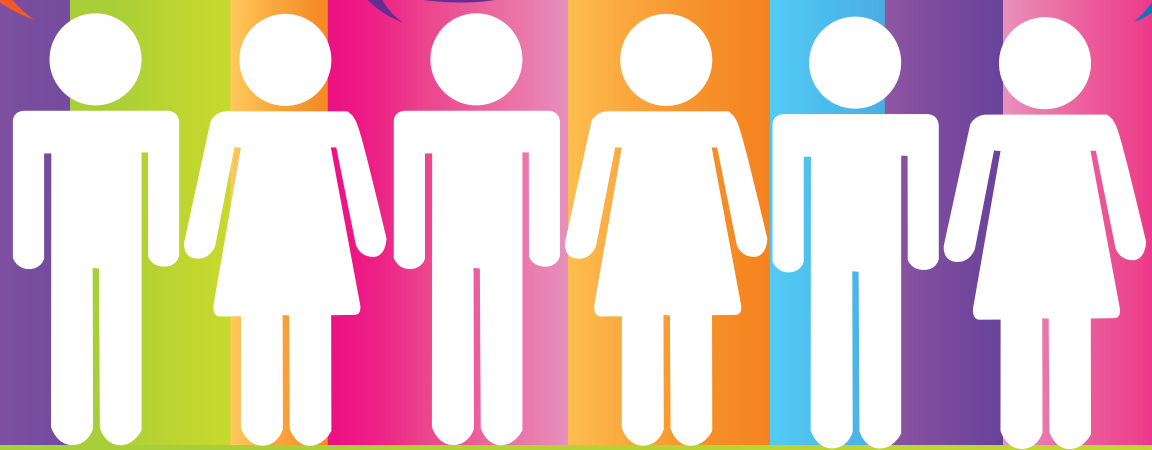


**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
TAHUN 2012**



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
TAHUN 2012

DAFTAR ISI

I. Pengantar .....	3
II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik KPK 2012 .....	4
1. Sarana dan Prasarana	
2. Anggaran	
3. Sumber Daya Manusia	
III. Rincian Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik KPK 2012 .....	5
IV. Sengketa Informasi Publik .....	6
V. Kendala dalam Pelaksanaan Informasi Publik .....	7
VI. Rencana Tindak Lanjut .....	7



## I. PENGANTAR

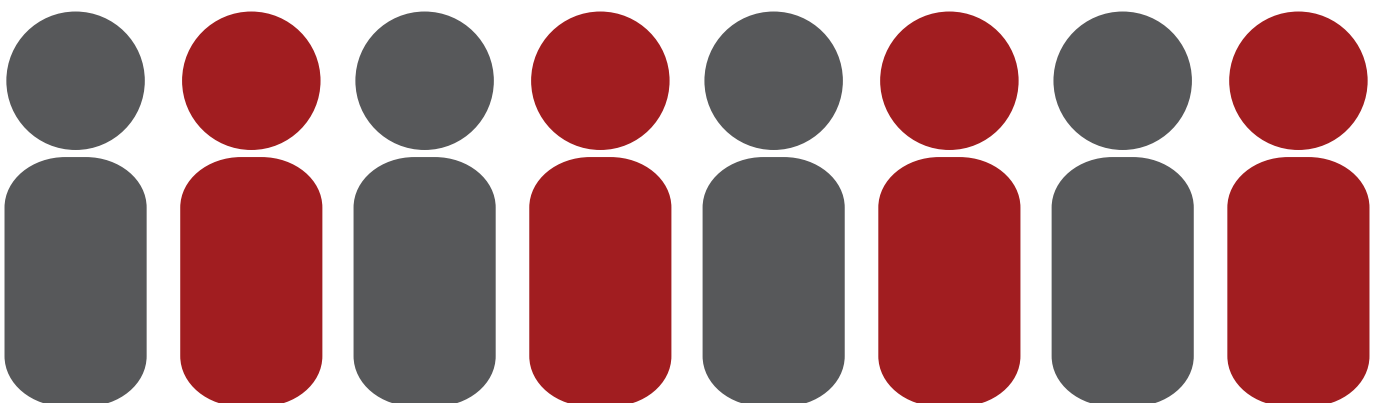
*Dua tahun berjalan sejak dibentuknya Pelayanan Informasi Publik (PIP) KPK tahun 2010 di Bagian Pemberitaan, Pelayanan Informasi dan Publikasi Biro Humas KPK, yang merupakan respon terhadap pemberlakuan UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, saat ini telah sampai pada tahap penyelesaian beberapa kendala dan rencana tindak lanjut pada tahun sebelumnya terutama pada sisi pelayanan Informasi.*

*Seperti diketahui, pemberlakuan UU ini mengharuskan badan-badan publik dan institusi pemerintahan secara terbuka memberikan segala informasi yang dibutuhkan masyarakat. Badan publik yang tidak membuka akses informasi terhadap masyarakat, bisa dikenai sanksi pidana maupun denda.*

*Selama tahun 2012, Bagian Pemberitaan, Pelayanan Informasi dan Publikasi fokus pada pembenahan internal untuk dapat menindak lanjuti persyaratan Komisi Informasi mengenai PPID dan perangkatnya. Telah ditetapkan SK PPID mengenai Informasi yang dikecualikan, penyempurnaan SOP dan Panduan Pelayanan Informasi Publik dan juga penempatan Informasi-informasi yang wajib disediakan pada kanal tersendiri di website KPK menjadi pencapaian tersendiri di tahun ini.*

*Animo masyarakat yang semakin ingin berperan aktif dalam pemberantasan korupsi, melalui keterbukaan akses informasi yang bisa diperoleh dari KPK terlihat jelas dengan kenaikan permintaan Informasi publik KPK yang hampir mencapai 40% dari tahun sebelumnya. Bagi Biro Humas KPK, kenaikan permintaan informasi dan ragam jenisnya ini juga sebagai bukti adanya akselerasi pemberantasan korupsi, akselerasi demokrasi dan keinginan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dengan memberikan akses informasi yang dibutuhkan masyarakat.*

*Biro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi  
Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi*



## II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KPK 2012

Pelayanan Informasi Publik (PIP) KPK mencatat beberapa kemajuan selama tahun 2012, selain pencapaian pada perangkat PIP yaitu pengesahan daftar Informasi, penyempurnaan SOP dan Panduan serta tersedianya kanal PIP tersendiri di website KPK, media informasi yang disediakan sejak tahun 2011 yaitu perangkat/website Anti-Corruption Clearing House (ACCH) menunjukkan peningkatan pengunjung. Media ini yang memuat berbagai data dari berbagai unit kerja di KPK yang bisa diakses masyarakat melalui website, sehingga volume permintaan informasi yang datang langsung bisa berkurang karena masyarakat dapat dengan mudah dan dimana saja mengakses informasi mengenai KPK. Sampai dengan saat ini di ACCH yang tetap menjadi favorit banyak kalangan terutama jurnalis adalah dengan tersedianya akses data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), yang juga dapat membuat masyarakat luas berperan aktif dalam monitoring profil para penyelenggara negara.

### 1. Sarana dan Prasarana

Tersedia ruangan khusus untuk Pelayanan Informasi Publik di lantai 1 (public area) gedung KPK yang di desain menjadi ruangan yang menarik untuk pelayanan publik dan memberikan kesan “hangat” bagi para tamu-nya. Semua layanan informasi publik di KPK bersifat gratis dan tidak dipungut bayaran apapun, termasuk untuk penggantian materi informasi yang diminta oleh masyarakat. KPK berupaya untuk memenuhi permintaan kebutuhan data secara softcopy terlebih dahulu, kecuali memang jika yang diperlukan adalah data hardcopy.

Untuk informasi mengenai PIP sendiri, disediakan :

1. Papan Pengumuman (Media informasi KPK) yang memberikan informasi mengenai tata cara dan alur permintaan informasi KPK serta informasi berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik lainnya,
2. Dua (2) orang Petugas Informasi yang akan melayani permintaan informasi melalui saluran PIP yang disediakan,
3. Portal Anti-Corruption Clearing House (ACCH) yang akan menjadi data base informasi KPK yang bisa diakses publik. Portal ini berbeda dengan website KPK, dimana lebih banyak berisi data dan informasi yang berkaitan dengan kinerja KPK sebagai lembaga penegak hukum dan hal yang dilakukan dalam upaya pemberantasan korupsi.

Sebagai sarana berkomunikasi, disediakan beberapa saluran pelayanan informasi sebagai berikut:

1. Datang Langsung : Menemui Petugas Pelayanan Informasi Publik di ruang Pelayanan Informasi Publik Gedung KPK lantai 1 Jln. H.R Rasuna Said Kav. C-1 Jakarta 12920
2. Surat : dialamatkan kepada Biro Humas, Gedung KPK Jln. H.R Rasuna Said Kav. C-1 Jakarta 12920
3. Telepon : 021-2557 8498 dan Fax : 021-5290 5592
4. Email : [informasi@kpk.go.id](mailto:informasi@kpk.go.id)
5. Website dan Mobile Website : [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id) dan <http://m.kpk.go.id>
6. Media Sosial : Facebook - Kpk Ri, Fanpage – Komisi Pemberantasan Korupsi dan Twitter - @KPK\_RI

### 2. Anggaran

Anggaran Pelayanan Informasi Publik untuk tahun 2012 menggunakan mata anggaran yang terdapat pada Biro Humas.

### 3. Sumber Daya Manusia

Sedangkan untuk personel SDM yang menangani Pelayanan Informasi Publik, saat ini Biro Humas KPK menugaskan satu (1) orang fungsional Humas untuk koordinator Pelayanan Informasi Publik dan dua (2) orang Petugas Informasi.



### III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KPK 2012

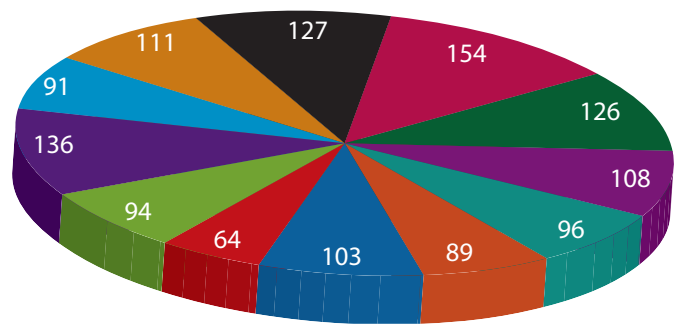
Selama tahun 2012, Pelayanan Informasi Publik (PIP) KPK menerima permintaan pelayanan informasi publik yang telah diregister sebanyak 1.299 permintaan yang dikirimkan melalui surat, email, telepon maupun datang langsung, hal ini mengalami peningkatan sekitar 40% dari tahun 2011 sebanyak 906 permintaan. Hampir seluruh permintaan yang datang dipenuhi, karena informasi yang diminta adalah informasi yang bersifat terbuka untuk umum.

Untuk pemenuhan informasi sepanjang tahun ini dapat dipenuhi dengan standar waktu yang telah ditentukan dan kesepakatan dengan pemohon informasi. Yang dimaksud dengan kesepakatan dengan pemohon informasi adalah petugas layanan PIP telah mengkomunikasikan perihal pemenuhan informasi apabila tidak dapat dipenuhi dalam waktu yang singkat dan permintaan untuk diberikan alokasi waktu tambahan.

#### 1. Statistik Permohonan Informasi berdasarkan saluran informasi yang disediakan

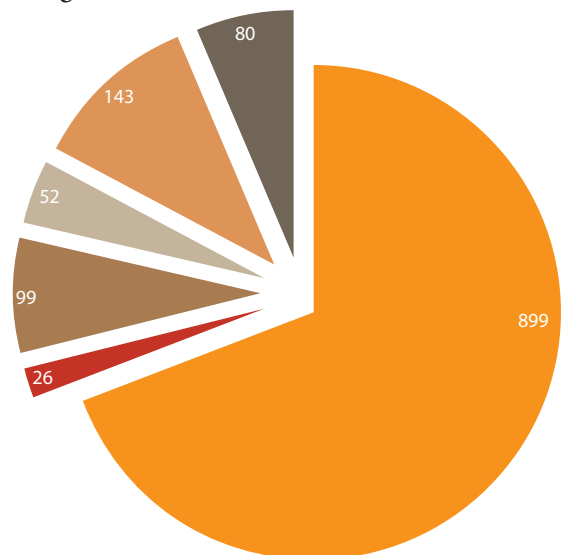
NO	PERIODE	PELAYANAN INFORMASI				TOTAL
		Telp	Email	Surat	Langsung	
1	Jan	46	46	4	31	127
2	Feb	58	73	2	21	154
3	Mar	50	48	1	27	126
4	Apr	43	37	0	28	108
5	Mei	38	39	4	15	96
6	Jun	37	43	0	9	89
7	Jul	35	53	4	11	103
8	Ags	26	31	1	6	64
9	Sep	30	60	1	3	94
10	Okt	43	84	2	7	136
11	Nov	42	34	1	14	91
12	Des	19	84	1	7	111
	Total	467	632	21	179	1299

#### 2. Statistik jumlah Permohonan Informasi Publik bulanan



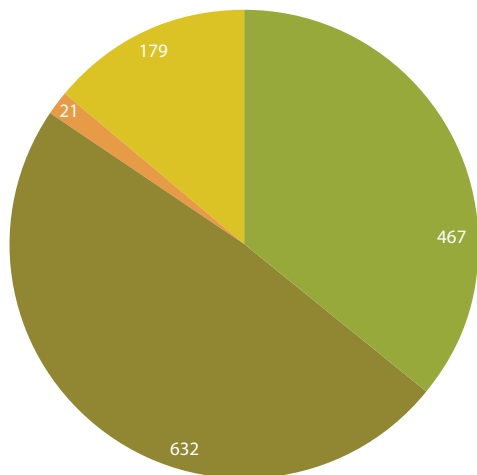
No	Bulan	Total
1	Januari	127
2	Februari	154
3	Maret	126
4	April	108
5	Mei	96
6	Juni	89
7	Juli	103
8	Agustus	64
9	September	94
10	Oktober	136
11	November	91
12	Desember	111
	TOTAL	1,299

#### 3. Statistik Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Jenis Informasi Yang Diminta



NO	JENIS INFORMASI	JUMLAH
1	Administrasi	899
2	Pengaduan Masyarakat	26
3	LHKPN	99
4	Kelembagaan KPK	52
5	Pencegahan	143
6	Penindakan	80
	Total	1299

#### 4.Statistik Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Saluran Permintaan Informasi



NO	JENIS INFORMASI	JUMLAH
1	Telepon	467
2	Email	632
3	Surat	21
4	Langsung	179
	Total	1299

#### IV. SENGKETA INFORMASI PUBLIK

NO	TANGGAL	NAMA	INFORMASI YANG DIMINTA	PERIHAL KEBERATAN	JAWABAN KEBERATAN	POSISI KASUS
1	10 Januari 2012	Muhammad HS (Sahabat Muslim Indonesia)	- Informasi mengenai peraturan tentang SOP yang berlaku di lingkungan KPK. - Informasi berupa data rekapitulasi laporan kekayaan para bakal calon dan/atau calon bupati dan wakil bupati Bekasi periode 2012-2017 yang disampaikan kepada KPK beserta surat pengantarnya.	Permintaan Informasi belum diberikan (ditanggapi tidak sebagaimana yang dimohon)	- SOP di lingkungan KPK merupakan informasi yang dikecualikan - Rekap laporan kekayaan para bakal calon dan/atau calon bupati, KPK tidak berwenang mengumumkannya dan tidak merupakan data TBN sehingga bukan termasuk kategori informasi publik di KPK	Jawaban surat sudah dikirim ke ybs tgl surat 13 Januari 2012
2	2 Februari 2012	Muhammad HS (Sahabat Muslim Indonesia)	- Informasi berupa dokumen lengkap pencairan anggaran untuk kegiatan pengadaan B/J di lingkungan KPK 2011 beserta seluruh lampiran dan dokumen pendukung belum diberikan	Keterangan dari PPID yang menyatakan dokumen pencairan anggaran kegiatan pengadaan B/J di lingkungan KPK tidak tersedia	Penjelasan bahwa Informasi tersebut merupakan informasi yang dikecualikan karena memuat kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang.	Jawaban surat sudah dikirim ke ybs tgl surat 12 Maret 2012
3	1 Mei 2012	Muhammad HS (Sahabat Muslim Indonesia)		Tidak disediakan-nya informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala pada website resmi KPK sesuai ketentuan peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik	Menjadi project tahun 2012-2013	

## V. KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 2012

Dalam pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik selama tahun 2012, beberapa kendala yang dihadapi dalam pelayanan, pengelolaan maupun pemenuhan Informasi, antara lain :

1. Akusisi informasi internal yang membutuhkan waktu sehingga memakan waktu untuk pemenuhan informasi.
2. Kekurangan SDM khususnya untuk pengelolaan Informasi, dimana Informasi yang didapatkan dari unit-unit kerja lain yang berupa data mentah dapat di tulis ulang untuk kepentingan publik. Hal ini menyebabkan lamanya waktu untuk pemenuhan Informasi, karena petugas layanan juga merangkap sebagai pengelola Informasi.
3. Surat permintaan informasi publik ditujukan ke unit kerja yang lain, bukan ke PPID/Biro Humas sehingga memerlukan waktu lebih lama sampai ke PIP menunggu disposisi/berjalannya surat.
4. Untuk permintaan informasi yang dikirim melalui pos, pemohon informasi sering tidak mengembalikan tanda terima yang bisa dikirimkan melalui fax/email ke Biro Humas KPK.



## VI. RENCANA TINDAK LANJUT

Komisi Pemberantasan Korupsi berkomitmen untuk terus memperbaiki Pelayanan Informasi Publik pada tahun-tahun berikutnya. Berikut ini rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada tahun 2012 :

1. Melengkapi Pelayanan Informasi Publik dengan feedback tools yang memungkinkan setiap pengguna/peminta informasi publik langsung memberikan penilaian/feedback atas layanan yang diterimanya dari KPK.
2. Penambahan SDM dan pemisahan petugas layanan dan pengelola Informasi, sehingga pemenuhan Informasi dan pengemasan Informasi dapat berjalan lebih baik.